

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Kerja Sama Selatan-Selatan dan Indonesia

Hubungan internasional dewasa ini diwarnai dengan berbagai dinamika yang dinamis di antara para aktornya. Di satu sisi bisa terjadi ketegangan dengan intensitas yang tinggi hingga mengarah ke peperangan, dan di sisi lain terdapat juga hubungan kerjasama yang baik dan menggambarkan dukungan dan solidaritas yang erat di antara para aktornya. Oleh karena itu, salah satu kerjasama yang ada dan akan menjadi sorotan penelitian kali ini ialah Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS).

Kerja Sama Selatan-Selatan, sebagaimana dijelaskan di dalam laman daring Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dapat digambarkan sebagai sebuah usaha dari masyarakat dan negara-negara yang berada di wilayah Selatan, yang dengan didorong oleh pengalaman, objektivitas dan solidaritas yang sama, didukung oleh prinsip-prinsip yang sama, untuk dapat memiliki kemerdekaan dan kebebasan yang tidak bersyarat (United Nations, 2024). *Japan's International Cooperation Agency* (JICA) sendiri mendefinisikan Kerja Sama Selatan-Selatan sebagai sebuah kerjasama yang memiliki tujuan untuk memperkuat pembangunan mandiri yang di dalamnya melibatkan penguatan hubungan antar negara berkembang sembari menjalankan kerjasama teknis dan ekonomi (Japan International Cooperation Agency, 2024). Kevin Gray dan Barry Gills, dalam salah satu publikasinya yang

berjudul “*South-South Cooperation and the Rise of the Global South*” melihat Kerja Sama Selatan-Selatan sebagai sebuah konsep pengaturan kunci dan serangkaian praktek yang bertujuan untuk melakukan perubahan dari sejarah kelam yang telah terjadi melalui visi keuntungan bersama dan solidaritas di antara mereka yang kurang beruntung dalam sistem dunia ini (Gray & Gills, 2015).

Berdasarkan *Buenos Aires Plan of Action* (BAPA) yang disahkan dalam Sidang Majelis Umum PBB di 1978 guna mendorong dan melaksanakan kerja sama maupun kolaborasi teknis antar negara berkembang, tujuan utama dari Kerja Sama Selatan-Selatan menurut PBB ialah (United Nations, 2024): 1) Memperkuat kemampuan negara-negara berkembang untuk secara mandiri merumuskan solusi atas tantangan pembangunan yang selaras dengan nilai-nilai, harapan, dan kebutuhan khas masing-masing; 2) Mendorong solidaritas dan kemandirian kolektif antar negara berkembang melalui pertukaran pengalaman, pemanfaatan bersama sumber daya teknis dan lainnya, serta pengembangan kapasitas yang saling melengkapi; 3) Memperkuat kemampuan negara berkembang dalam mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu pembangunan utama secara bersama, serta merumuskan strategi untuk mengatasinya; 4) Meningkatkan jumlah dan mutu kerja sama pembangunan internasional dengan mengembangkan kapasitas demi efektivitas pemanfaatan sumber daya yang tersedia; 5) Mengembangkan dan memperkuat kapasitas teknologi di negara berkembang agar lebih efektif dalam penggunaannya, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam menyerap dan menyesuaikan teknologi dan keterampilan sesuai kebutuhan pembangunan masing-masing; 6) Memperbaiki komunikasi antar negara berkembang guna meningkatkan

kesadaran terhadap isu-isu bersama, memperluas akses terhadap pengetahuan dan pengalaman, serta mendorong penciptaan pengetahuan baru dalam mengatasi tantangan pembangunan; 7) Memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan negara-negara yang tertinggal, negara berkembang yang terkurung daratam, negara kepulauan kecil, serta negara yang terdampak serius oleh bencana alam atau krisis lainnya; dan 8) Mengupayakan keterlibatan yang lebih aktif dari negara-negara berkembang dalam sistem ekonomi global serta memperluas jangkauan kolaborasi internasional guna mendukung agenda pembangunan.

Indonesia sudah jelas memiliki peran penting dalam skema Kerja Sama Selatan-Selatan ini karena kerja sama ini sendiri dipelopori oleh perundingan para delegasi negara-negara merdeka yang menghadiri Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung tahun 1955 lalu (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2008). Dihadiri oleh setidaknya 29 perwakilan negara-negara baik di Asia maupun di Afrika, termasuk Indonesia (sebagai satu dari 5 negara pelopor, di samping Burma (Myanmar), Ceylon (Sri Lanka), India dan Pakistan) konferensi ini diselenggarakan dengan tujuan utama untuk mengkaji isu-isu perdamaian global serta mengevaluasi kontribusi negara-negara Dunia Ketiga dalam dinamika Perang Dingin, termasuk dalam proses pembangunan ekonomi dan perjuangan dekolonisasi. Seluruh pembahasan tersebut dilandasi oleh prinsip-prinsip fundamental seperti penghormatan terhadap kedaulatan, penolakan terhadap agresi, larangan campur tangan dalam urusan domestik, serta kesetaraan antarnegara. (Department of State of United States of America, 2024). Selain itu, disinyalir juga bahwa para delegasi negara-negara ini bertekad dalam solidaritas

untuk menentang hubungan vertikal antara negara jajahan dan negara metropolitan yang dinilai menghambat hubungan antar negara di belahan bumi Selatan yang kemudian memunculkan pergerakan *Non-Aligned Movement* (NAM) yang berfokus untuk menentang ketidaksetaraan yang mendalam sembari juga mengurangi ketergantungan politik dan ekonomi dunia terhadap negara-negara di belahan bumi Utara (Gray & Gills, 2015). Sebagai hasil akhir dari konferensi ini, kemudian terbitlah *Final Communiqué* Konferensi Asia-Afrika Bandung (24 April 1955) yang di dalamnya memuat masalah dari kepentingan dan kekhawatiran bersama dari negara-negara di Asia maupun di Afrika, yakni meliputi kerjasama ekonomi, kerjasama budaya, hak asasi manusia dan penentuan nasib sendiri, masalah dari masyarakat yang memiliki ketergantungan, masalah lain (isu Palestina, Irian Barat dan Yemen), dan deklarasi penguatan perdamaian dunia dan kerjasama (Departemen Luar Negeri Indonesia, 1955).

Selain dari sisi sejarah yang menggambarkan keterlibatan awal Indonesia dalam skema Kerja Sama Selatan-Selatan ini, maka kontribusi Indonesia sebagai bagian dari kerja sama ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa yang didasari pada *Action Plan* BAPA yang telah disepakati. Dalam laporan tahunan “*Indonesia’s South-South and Triangular Cooperation*” pada tahun 2014, disebutkan beberapa aktivitas yang menggambarkan keterlibatan Indonesia (Secretariat of National Coordination Team of South-South and Triangular Cooperation, 2014). Yang pertama pada tahun 1980-an, Indonesia mendirikan Komite Koordinasi dari Kerja sama Teknis Internasional yang kemudian menjadi titik pusat dari kegiatan kerja sama teknis Indonesia dengan negara-negara berkembang lainnya. Kemudian salah

satu proyek besar Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan ini adalah *Apprenticeship Project* dalam budidaya padi, yang mana di dalamnya meliputi transfer teknologi dari budidaya padi di Gambia dan Tanzania pada tahun 1985. Pusat pelatihan di Gambia dan Tanzania masih ada hingga hari ini, dan fungsinya juga sudah melebar untuk melayani kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di kedua negara ini, juga di sekitar kawasan tersebut.

Indonesia memfokuskan implementasi Kerja Sama Selatan-Selatan pada tiga tema utama, sebagaimana tercermin dalam berbagai program pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2014 (*Secretariat of National Coordination Team of South-South and Triangular Cooperation, 2014*): Pertama ialah tema pembangunan yang mencakup 16 program, mulai dari pelatihan pengembangan masyarakat, teknologi pascapanen, agribisnis hortikultura, hingga penguatan kapasitas perempuan dan ketahanan pangan, contohnya ialah *Third Country Training Programme on Participatory Community Development Training* di Afghanistan. Kedua ialah tema tata kelola dan perdamaian yang terdiri dari lima program, termasuk pelatihan *good governance*, hak asasi manusia, dan resolusi konflik, contohnya ialah *Peace through Development in Disadvantaged Areas* di Myanmar. Ketiga adalah tema ekonomi yang mencakup 3 program dengan berfokus pada pengembangan sektor agro dan tekstil, pelatihan keuangan mikro, serta pendirian pusat produksi makanan, contohnya ialah *Establishment of Krupuk Center* di Fiji. Tema lainnya mencakup dua program yaitu kegiatan pelatihan produksi dokumenter televisi dan kunjungan pertukaran serta pengiriman tenaga ahli, contohnya ialah *Documentary Production Training for TV* di Bhutan. Dengan

demikian dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam Kerja Sama Selatan-Selatan ini, dan keseriusan Indonesia dalam skema kerja sama ini terefleksikan dalam pendirian Tim Koordinasi Nasional untuk Kerja Sama Selatan-Selatan dan Kerja Sama Triangular yang memiliki serangkaian program, seperti yang sudah disebutkan di atas.

Berangkat dari semangat yang sama untuk berperan aktif dalam kerja sama multilateral dan pembangunan internasional yang mana di dalamnya juga terkandung Kerja Sama Selatan-Selatan, Indonesia membentuk sebuah unit kerja di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki bentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Unit kerja ini bertugas untuk mengelola kerja sama pembangunan internasional serta memfasilitasi pemberian bantuan secara mandiri dengan meminimalisir ketergantungan pada dana APBN. Unit ini dikenal sebagai Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau *Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID)* yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 927/KMK/ 2019. Peluncuran LDKPI ini diresmikan oleh Wakil Presiden Indonesia kala itu, Bapak Jusuf Kalla, pada 18 Oktober 2019 yang berlokasi di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Indonesia. Pada acara tersebut, Wapres Jusuf Kalla menekankan bahwa LDKPI ialah salah satu bentuk implementasi “diplomasi tangan di atas” milik Indonesia. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Dengan pembentukan LDKPI, Indonesia semakin memperkuat perannya dalam kerja sama pembangunan internasional, termasuk Kerja Sama Selatan-Selatan (Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2019).

1.1.2 Dinamika di Kawasan Pasifik Selatan

Dalam konteks Kerja Sama Selatan-Selatan, Indonesia semakin memposisikan kawasan Pasifik Selatan sebagai prioritas strategis dalam kerangka bantuan luar negerinya, terutama sejak pembentukan *Indonesian AID* pada tahun 2019. Tercatat bahwa kawasan Pasifik Selatan menjadi penerima utama program bantuan teknis Indonesia, mencerminkan niat Jakarta untuk memperkuat hubungan diplomatik dan memperluas pengaruhnya di wilayah yang semakin menjadi ajang persaingan geopolitik. Menurut data *Lowy Institute*, Indonesia telah memberikan pembiayaan pembangunan resmi (*Official Development Finance/ODF*) kepada lima negara Pasifik, dengan Fiji sebagai penerima terbesar, menerima total sekitar US\$ 9,6 juta sejak 2008. Pada tahun 2022 saja, bantuan Indonesia ke kawasan ini meningkat sebesar 121% dibandingkan tahun sebelumnya (Sumando, 2024).

Dengan melihat pemilihan kawasan ini sebagai prioritas Indonesia, maka perlu dilihat apa saja dinamika yang ada di kawasan ini. Sejak tahun 2019, kawasan Pasifik Selatan telah mengalami transformasi dramatis dalam lanskap hubungan internasionalnya. Dahulu dianggap sebagai wilayah pinggiran, kawasan ini kini menjadi arena strategis bagi kekuatan global. Perubahan ini didorong oleh meningkatnya pengaruh Tiongkok, penyesuaian strategi dari Amerika Serikat dan sekutunya, serta semakin kuatnya ketegasan negara-negara kepulauan Pasifik. Menurut *Pacific Aid Map* dari *Lowy Institute*, lebih dari USD 3,5 miliar bantuan telah dikucurkan ke kawasan ini antara tahun 2019 hingga 2023, dengan Australia, Tiongkok, dan Selandia Baru sebagai donor utama (Teo, 2025). Perubahan paling mencolok di kawasan Pasifik Selatan adalah bangkitnya kembali persaingan antar

kekuatan besar, khususnya antara Tiongkok dan Amerika Serikat. *Belt and Road Initiative* (BRI) milik Tiongkok telah meluas ke negara-negara kepulauan Pasifik, menawarkan investasi infrastruktur dan keterlibatan diplomatik. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat dan sekutunya—terutama Australia dan Selandia Baru—meningkatkan kehadiran mereka melalui bantuan, kerja sama militer, dan kemitraan strategis (Pan & Clarke, 2022). Meningkatnya persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah menjadi ciri utama geopolitik di kawasan Pasifik Selatan. Jangkauan diplomatik dan ekonomi Tiongkok tumbuh secara signifikan, dengan lebih dari 100 perjanjian bilateral yang telah ditandatangani bersama negara-negara kepulauan Pasifik sejak tahun 2019. Sebagai respons, Amerika Serikat meluncurkan inisiatif “*Partners in the Blue Pacific*” pada tahun 2022 bersama Australia, Jepang, Selandia Baru, dan Inggris, yang bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya pembangunan dan menyeimbangkan pengaruh Beijing. Amerika Serikat juga membuka kembali kedutaan besarnya di Kepulauan Solomon dan Tonga, sebagai sinyal komitmen baru terhadap kawasan ini (Teo, 2025). Menjawab rivalitas ini, Australia merespons dengan kebijakan “*Pacific Step-up*”, yang mencakup peningkatan bantuan dan keterlibatan diplomatik. Dari tahun 2019 hingga 2024, Australia telah mengalokasikan lebih dari US\$ 6,9 miliar dalam bentuk bantuan pembangunan untuk kawasan Pasifik. Sementara itu, kebijakan “*Pacific Reset*” dari Selandia Baru menekankan pada rasa saling menghormati dan kerja sama dalam isu perubahan iklim, meskipun kontribusi bantuannya tetap relatif kecil dibandingkan Australia. Kedua negara juga memperluas kerja sama pertahanan, dengan Australia menandatangani perjanjian

keamanan baru bersama Papua Nugini dan Fiji. Namun, para pengamat mengkritik bahwa upaya-upaya ini sering kali lebih mengutamakan kepentingan strategis dibandingkan kebutuhan pembangunan lokal (Teo, 2025).

1.1.3 Isu Papua Sebagai Dinamika di Pasifik Selatan

Selain posisi Pasifik Selatan yang semakin strategis yang mendorong Indonesia untuk memperluas perannya di kawasan ini, maka salah satu isu yang sudah lama menjadi dinamika di kawasan ini dan bersinggungan secara langsung dengan Indonesia adalah terkait isu Papua. Isu Papua mulai mendapat perhatian di kawasan Pasifik Selatan sejak akhir 1960-an, terutama setelah pelaksanaan PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969 yang diselenggarakan oleh PBB. Banyak pihak, termasuk negara-negara Melanesia, menganggap proses ini tidak sah karena adanya dugaan intimidasi dan manipulasi oleh pemerintah Indonesia. Sejak saat itu, isu penentuan nasib sendiri untuk masyarakat Papua menjadi bagian dari narasi solidaritas Melanesia, terutama di negara-negara misalnya Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini (Walsh, 2016). Selain itu, artikel dari Lowy *Institute* berjudul “PNG can't turn a blind eye to the conflict next door” menjelaskan bahwa meskipun pemerintah Papua Nugini secara resmi menjaga hubungan diplomatik yang baik dengan Indonesia, terdapat tekanan dari dalam negeri yang menunjukkan simpati terhadap perjuangan rakyat Papua Barat. Misalnya, sebuah video viral pada tahun 2021 menunjukkan sekelompok warga dari provinsi *East Sepik* yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap Papua Barat dan bahkan menyatakan kesiapan untuk “berperang” melawan tentara Indonesia. Meskipun pemerintah pusat tidak

memberikan komentar resmi, insiden ini mencerminkan adanya ketegangan antara solidaritas etnis dan kepentingan diplomatik. Kedekatan geografis dan hubungan etnis antara masyarakat di perbatasan Papua Nugini dan Papua Barat menjadikan isu ini sangat sensitif. Banyak warga Papua Nugini, terutama di provinsi perbatasan seperti *East* dan *West Sepik*, memiliki ikatan budaya dan keluarga dengan masyarakat Papua. Hal ini menciptakan tekanan dari akar rumput terhadap pemerintah Papua Nugini untuk lebih vokal dalam mendukung hak-hak rakyat Papua Barat (Jorari, 2021).

Pada tahun 2014, *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) diberikan status ‘Pengamat’ dalam *Melanesian Spearhead Group* (MSG), yang menandai pengakuan politik penting terhadap identitas Papua Barat. Sejak itu, isu Papua semakin sering diangkat dalam forum-forum regional seperti *Pacific Islands Forum* (PIF) dan Sidang Umum PBB, terutama oleh negara-negara yang relatif kecil misalnya Tuvalu, Vanuatu, Tonga, dan Kepulauan Solomon. Mereka dengan terbuka menyerukan perhatian global terhadap dugaan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Papua serta mengaitkannya dengan hak penentuan nasib sendiri. Meskipun beberapa negara Pasifik secara terbuka mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi Papua, PIF tetap berhati-hati dan menghindari menyebutkan secara eksplisit perjuangan kemerdekaan Papua dalam komunikasi resminya. Forum ini secara konsisten mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua, yang dulunya dikenal sebagai Nugini Belanda. Hal ini mencerminkan tekanan diplomatik dan kepentingan geopolitik yang lebih luas, termasuk ketakutan

akan ketegangan dengan Indonesia dan pengaruh negara-negara besar (Walsh, 2016).

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dilihat bahwa isu Papua merupakan sebuah dinamika di Pasifik Selatan, melihat adanya berbagai dukungan yang diberikan berbagai negara di kawasan ini kepada gerakan kemerdekaan Papua Barat seperti Vanuatu dan Kep Solomon. Selain itu, ULMWP juga terang-terangan mengenai tujuan utamanya yaitu kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia, dan terus mengencarkan usahanya dalam berbagai forum kawasan seperti menjadi anggota tetap dari MSG agar meningkatkan dukungan dari negara-negara Melanesia untuk mencapai tujuan utamanya ini.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang diberikan di atas, maka dapat dipahami bahwa Indonesia semakin melihat peran strategis dari kawasan Pasifik, dan berangkat dari semangat Kerja Sama Selatan-Selatan yang Indonesia inisiasi, maka tidak heran jika Indonesia hendak memperluas perannya di kawasan ini. Selain nilai strategis kawasan ini yang menguntungkan, Indonesia sendiri juga sadar akan masalah domestiknya, yakni terkait Papua, yang menjadi sorotan internasional, termasuk negara-negara di kawasan Pasifik Selatan. Oleh karena itu, adalah sebuah konsekuensi logis bagi Indonesia untuk melakukan perumusan dan implementasi kebijakan luar negeri di kawasan ini guna mengakomodir situasi sistem internasional yang ada sembari juga mempertimbangkan kepentingan nasionalnya guna menavigasi peran Indonesia di kawasan ini. Dan untuk mempertajam analisa,

penulis hendak mengangkat kebijakan bantuan luar negeri Indonesia ke Fiji sebagai studi kasus yang akan ditelaah lebih jauh.

Oleh karena itu, pertanyaan penelitian dari tesis ini ialah **“Bagaimana analisis proses pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks Kerja Sama Selatan-Selatan melalui studi kasus bantuan luar negeri Indonesia ke Fiji, dan kompleksitas tantangan dan peluangnya, terutama terkait isu konflik di Papua?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian melalui penyusunan tesis ini ialah guna melihat bagaimana analisa proses pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks Kerja Sama Selatan-Selatan melalui studi kasus bantuan luar negeri Indonesia ke Fiji dan kompleksitas tantangan dan peluangnya, terutama terkait isu konflik di Papua. Dan secara lebih jauh, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana *Indonesian AID* sebagai kendaraan kerja sama pembangunan internasional dalam kapasitasnya sebagai donor bisa dilaksanakan secara efektif bagi Indonesia.

1.4 Signifikansi Penelitian

Pada akhirnya, tesis ini diharapkan akan menyumbang kontribusi terhadap pengembangan ilmu Hubungan Internasional terutama dalam praktik kerja sama pembangunan internasional. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dilihat bagaimana Indonesia tidak hanya mampu berkontribusi terhadap pembangunan

global, tapi secara paralel bagaimana Indonesia bisa semakin mengokohkan perannya dalam level global sehingga membuat posisi Indonesia semakin diperhitungkan dalam pembangunan internasional, tidak hanya sebagai penerima donor tetapi juga sebagai negara donor yang sedang berkembang. Dan bagaimana kepentingan nasional Indonesia bisa terjaga dan tercapai melalui pelaksanaan kerja sama pembangunan internasional di kawasan ini.

1.5. Sistematika Penulisan Tesis

Dalam penelitian ini, terdapat lima bagian yang dijelaskan secara menyeluruh melalui bagian sistematika penulisan, adapun kelima bagian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I: Bab satu akan menjelaskan mengenai latar belakang serta konteks penelitian yang menguraikan mengenai Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS), dinamika yang ada di kawasan Pasifik Selatan serta isu Papua sebagai salah satu dinamika yang ada di kawasan ini. Setelah itu bagian ini akan menjelaskan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian serta sistematika penulisan tesis guna mempermudah pembacaan alur keseluruhan tesis ini secara umum.

BAB II: Bab dua akan menyajikan tinjauan pustaka seputar isu-isu yang disebutkan di dalam bab sebelumnya, juga melihat sudut pandang para ahli melalui berbagai macam literatur dan sumber pustaka yang ada serta menunjukkan penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan seputar topik penelitian ini dan bagaimana penelitian kali ini diharapkan bisa memberikan kebaruan dari topik yang dibahas.

Bab ini juga menjabarkan teori dan konsep yang dipakai oleh penulis untuk menjadi landasan analisa, serta juga memuat argumen teoritis atau hipotesa penulis.

BAB III: Bab tiga menjelaskan metode serta pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis. Bab ini mencakup paradigma dan metode penelitian, sumber dan pengambilan data, objek yang diteliti, pernyataan keabsahan penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam megolah data guna proses analisa yang komprehensif.

BAB IV: Bab empat ini akan mencakup analisa lengkap dari penulis guna menjabarkan dan membahas hasil penelitian secara mendalam. Pada bab ini, penulis menggunakan berbagai data dari berbagai sumber, yang kemudian penulis olah sesuai dengan argumen dan teori yang penulis gunakan guna menuntun penulis mencapai hasil analisa dan jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya. Sehingga di dalamnya penulis menjabarkan interaksi variabel-variabel dalam proses analisa dan implementasi kebijakan luar negeri Indonesia dalam konteks Kerja Sama Selatan-Selatan dengan menggunakan studi kasus bantuan luar negeri Indonesia di Fiji dan kaitannya dengan isu konflik di Papua.

BAB V: sebagai bab terakhir, pada bab lima penulis menyimpulkan seluruh hasil analisa dari bab empat, dan penulis menjabarkan apa saja poin-poin kesimpulan sebagai hasil analisa tersebut dan bagaimana hal itu membantu penulis untuk tiba pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang ada. Selain itu, penulis juga menyampaikan saran, baik itu saran teoritis maupun saran sosial guna memperkaya penelitian-penelitian lain ke depannya seputar objek yang sama.